



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA

UNIT KERJA : BADAN PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAD BASARI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 718701

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 7.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 2.460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 3.910.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 85 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.222.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SPM SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
3. MOBIL, SUZUKI JIMNY JB 74 JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. MOBIL, HONDA SUV COMPACT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
5. MOTOR, YAMAHA MOTOR BEBEK Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ---**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.796.114.570**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.018.114.570

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 11.018.114.570

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.